

Pola Komunikasi Masyarakat Aceh dalam Interaksi Lintas Budaya dengan Warga Negara Asing

*Muhammad Yunus Ahmad¹, Muhammad Roja Erlian², Ridhwansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Email: m.yunus@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Interactions between Acehnese communities and foreign nationals have intensified alongside the growth of tourism, education, and social mobility in Aceh. Differences in language, cultural backgrounds, and social norms require adjustments in intercultural encounters. This study analyzes Acehnese communication patterns in interactions with foreign nationals, examines the socio-cultural factors that shape these patterns, and describes observable forms of communicative adaptation in everyday encounters. Employing a descriptive qualitative approach, the study draws on participant observation in Banda Aceh and Sabang, complemented by document-based review as a comparative analytical frame. Data were analyzed thematically through data reduction, display, and conclusion drawing. The findings indicate that Acehnese communication tends to emphasize politeness, caution, and indirect strategies in both verbal and nonverbal forms. These tendencies are reflected in careful wording, controlled intonation, and the management of interpersonal distance and eye contact, particularly in cross-gender interactions. Religious values, customary norms, and prior exposure to intercultural encounters accompany the formation of these patterns. Communicative adaptation is observed through simplified language use, strengthened nonverbal cues, and the selection of “safe” conversation topics. Overall, intercultural communication in Aceh emerges as an ongoing negotiation between openness to outsiders and the maintenance of local norms.

Keywords: *Intercultural Communication; Communication Patterns; Acehnese Community; Foreign Nationals; Politeness*

Abstrak

Interaksi antara masyarakat Aceh dan warga negara asing meningkat seiring berkembangnya pariwisata, pendidikan, dan mobilitas sosial di Aceh. Perbedaan bahasa, latar budaya, dan norma sosial menuntut penyesuaian dalam komunikasi lintas budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola komunikasi masyarakat Aceh dalam berinteraksi dengan warga negara asing, menguraikan faktor sosial-budaya yang membentuknya, serta menjelaskan bentuk adaptasi komunikasi yang tampak dalam situasi pertemuan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif di Banda Aceh dan Sabang, didukung studi dokumentasi sebagai kerangka pembanding. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa komunikasi masyarakat Aceh cenderung menekankan kesantunan, kehati-hatian, dan strategi tidak langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Pola tersebut tampak dalam pilihan tutur yang halus, pengelolaan intonasi, serta pengaturan jarak fisik dan kontak mata, terutama pada interaksi lintas gender. Faktor nilai keagamaan, adat istiadat, dan pengalaman pertemuan lintas budaya menyertai pembentukan pola tersebut. Adaptasi komunikasi tampak melalui

penyederhanaan bahasa, penguatan isyarat nonverbal, serta pemilihan topik yang dianggap aman. Temuan menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya di Aceh merupakan proses negosiasi antara keterbukaan terhadap pihak luar dan pemeliharaan norma lokal.

Kata kunci: *Komunikasi Antarbudaya; Pola Komunikasi; Masyarakat Aceh; Warga Negara Asing; Kesantunan*

A. PENDAHULUAN

Interaksi antara masyarakat Aceh dan warga negara asing semakin sering dijumpai, terutama di wilayah yang menjadi pusat aktivitas pariwisata, pendidikan, dan kerja sama sosial. Di Banda Aceh dan Sabang, pertemuan tersebut hadir dalam berbagai situasi keseharian, mulai dari percakapan singkat di ruang publik hingga interaksi yang lebih intens dalam lingkungan kerja dan pendidikan. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan nilai, norma, dan cara pandang yang berbeda. Perkembangan pengelolaan destinasi wisata di Aceh yang menonjolkan prinsip Muslim-friendly/halal turut memperluas ruang interaksi antara masyarakat lokal dan pengunjung dari luar, termasuk wisatawan mancanegara (Adinugraha et al., 2025).

Bagi masyarakat Aceh, komunikasi dengan orang asing berlangsung dalam bingkai budaya dan agama yang kuat. Nilai kesopanan, kehati-hatian dalam bertutur, serta perhatian terhadap batas-batas sosial dan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara berinteraksi. Kondisi ini membentuk pola komunikasi yang khas, yang dalam banyak situasi berpotensi berbeda dengan gaya komunikasi warga negara asing yang cenderung lebih langsung dan terbuka. Perbedaan tersebut kerap menuntut adanya penyesuaian dari kedua belah pihak agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan saling menghargai. Dalam kajian komunikasi, proses penyesuaian perilaku tutur terhadap lawan bicara dan konteks dikenal sebagai komunikasi akomodatif, yang menjelaskan perubahan gaya bahasa, pilihan strategi, dan pengelolaan relasi dalam interaksi lintas kelompok (Giles et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan bahasa dan budaya sering menjadi tantangan utama dalam komunikasi antara masyarakat Aceh dan warga negara asing. Studi tentang interaksi masyarakat Banda Aceh dengan wisatawan

manca negara menemukan bahwa keterbatasan penguasaan bahasa asing mendorong masyarakat lokal untuk lebih mengandalkan ekspresi nonverbal, seperti gestur dan ekspresi wajah, sebagai cara untuk menjaga kelancaran komunikasi (Mustawazir et al., 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kemampuan pendatang dalam menyesuaikan diri dengan bahasa dan norma lokal berpengaruh besar terhadap keberhasilan komunikasi dan proses integrasi sosial mereka di Aceh (Sitimaghfirah, 2022).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya lebih menyoroti pengalaman warga negara asing atau memusatkan perhatian pada konteks tertentu, seperti lingkungan kampus dan pariwisata. Masih terbatas kajian yang menempatkan masyarakat Aceh sebagai pelaku utama yang secara aktif membentuk dan mengelola pola komunikasi lintas budaya. Padahal, masyarakat Aceh memiliki landasan nilai lokal yang kuat, salah satunya tercermin dalam prinsip *peumulia jamee*, yaitu sikap memuliakan tamu yang telah lama menjadi bagian dari etika sosial. Dalam literatur, praktik keramahatan Aceh (*hospitality*) sering dibahas sebagai norma sosial yang kuat dalam menyambut “orang luar”, termasuk dalam konteks pertemuan dengan pendatang dan pihak asing (McNevin & Missbach, 2018). Prinsip ini mendorong sikap ramah dan terbuka terhadap orang luar, tetapi tetap berjalan dalam batas norma adat dan ajaran agama.

Dalam praktik sehari-hari, pola komunikasi masyarakat Aceh cenderung mengedepankan kesantunan, penggunaan bahasa yang hati-hati, serta penyampaian pesan secara tidak langsung. Gaya komunikasi semacam ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan menghindari potensi konflik. Namun, dalam konteks komunikasi lintas budaya, perbedaan gaya tersebut dapat memunculkan kesalahpahaman, terutama ketika warga negara asing menafsirkan sikap “tidak langsung” sebagai ketidakjelasan atau penolakan. Studi kesantunan lintas budaya menunjukkan bahwa strategi menjaga muka (*face-saving*) dan penghindaran ujaran yang berpotensi mengancam relasi merupakan praktik yang lazim muncul dalam situasi multikultural (Ambele & Boonsuk, 2018). Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat Aceh dan warga negara asing merupakan proses adaptif yang tidak selalu berjalan mulus, tetapi terus dinegosiasikan melalui pengalaman interaksi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Aceh dalam berinteraksi dengan warga

negara asing, menguraikan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya, serta menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi komunikasi yang muncul dalam menghadapi perbedaan budaya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai komunikasi antarbudaya di Aceh, dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam proses komunikasi lintas budaya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan pola komunikasi masyarakat Aceh dalam interaksi dengan warga negara asing pada situasi sehari-hari. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami praktik komunikasi dalam konteks sosial-budaya yang alami, terutama terkait kesantunan, kehati-hatian, dan kecenderungan komunikasi tidak langsung. Penelitian dilakukan di Banda Aceh dan Sabang sebagai wilayah dengan intensitas perjumpaan lintas budaya yang relatif tinggi melalui pariwisata, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif di ruang-ruang publik yang menjadi titik pertemuan masyarakat lokal dan warga negara asing, seperti kawasan wisata, lingkungan kampus, dan pusat aktivitas ekonomi. Observasi difokuskan pada aspek komunikasi verbal (pilihan bahasa, gaya bertutur, intonasi, kecenderungan tidak langsung) dan nonverbal (gestur, ekspresi wajah, jarak fisik, dan kontak mata), termasuk situasi yang melibatkan interaksi lintas gender. Untuk memperkuat konteks analisis, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi melalui penelusuran literatur relevan dan penelitian terdahulu sebagai kerangka pembandingan dalam membaca temuan lapangan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, catatan observasi dipilih dan difokuskan sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam narasi deskriptif dengan pengelompokan tema, yaitu (1) pola komunikasi, (2) faktor sosial-budaya yang tampak dalam situasi interaksi, dan (3) bentuk adaptasi komunikasi yang teramati. Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan temuan secara kontekstual untuk merumuskan kesimpulan mengenai pola komunikasi masyarakat Aceh dalam berinteraksi dengan warga negara asing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Komunikasi Masyarakat Aceh dalam Interaksi dengan Warga Negara Asing

Komunikasi antarbudaya dipengaruhi oleh perbedaan sistem makna, norma, serta cara mengekspresikan pesan dalam suatu budaya. Hall (1976) membedakan kecenderungan budaya berkonteks tinggi dan berkonteks rendah untuk menjelaskan mengapa sebagian masyarakat lebih mengandalkan isyarat situasional dan pesan implisit, sementara sebagian lain lebih menekankan kejelasan verbal secara langsung. Dalam konteks Aceh, etika sosial seperti *peumulia jamee* dan orientasi kesantunan dalam interaksi sehari-hari membentuk kecenderungan komunikasi yang mengutamakan keharmonisan relasi sosial. Konsekuensinya, praktik komunikasi cenderung diarahkan pada penjagaan muka (*face-saving*) dan penghindaran konfrontasi, sehingga pesan sering disampaikan secara implisit melalui pilihan kata, intonasi, dan isyarat situasional. Kecenderungan kesantunan dan kehati-hatian dalam praktik tutur juga tampak pada studi-studi lokal Aceh yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial melalui pilihan bahasa yang halus dan tidak konfrontatif dalam interaksi sehari-hari (Zurrahmah et al., 2020).

Berdasarkan catatan observasi partisipatif di ruang publik (kawasan wisata, lingkungan kampus, dan pusat aktivitas ekonomi) di Banda Aceh dan Sabang, pola komunikasi masyarakat Aceh dalam interaksi dengan warga negara asing menunjukkan kecenderungan sopan, berhati-hati, dan tidak langsung. Dalam aspek verbal, bahasa Indonesia tampak menjadi medium yang paling sering digunakan ketika warga negara asing tidak memahami bahasa Aceh. Namun, penggunaan bahasa Indonesia tersebut umumnya disertai gaya bertutur yang halus, pemilihan diksi yang aman, serta kecenderungan menghindari ungkapan yang terlalu lugas. Pada situasi ketika kemampuan bahasa asing terbatas, kelancaran komunikasi kerap dijaga melalui penyederhanaan kalimat, pengulangan informasi secara perlahan, dan pemanfaatan intonasi untuk menandai penekanan maksud. Pola penggunaan bahasa Indonesia sebagai “jembatan” komunikasi pada pertemuan lintas budaya juga ditemukan pada konteks Aceh lainnya, misalnya interaksi masyarakat Aceh dengan pengungsi Rohingya yang menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sosial ketika terjadi perbedaan bahasa (Safrizal, 2018).

Pada aspek nonverbal, observasi memperlihatkan perhatian pada jarak fisik, kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tubuh. Dalam situasi tertentu, kontak mata yang terlalu intens dan jarak yang terlalu dekat cenderung dihindari, terutama pada interaksi lintas gender, karena dapat dipahami sebagai kurang sesuai dengan norma kesopanan setempat. Sebaliknya, gestur sederhana seperti mengangguk, tersenyum, atau menunjuk arah secara hati-hati berfungsi membantu memperjelas pesan ketika komunikasi verbal tidak sepenuhnya memadai. Temuan ini sejalan dengan asumsi budaya berkonteks tinggi yang menempatkan konteks dan isyarat situasional sebagai bagian penting dari makna (Hall, 1976), serta menguatkan temuan penelitian sebelumnya bahwa komunikasi nonverbal menjadi strategi yang sering digunakan masyarakat lokal untuk menjembatani hambatan bahasa dalam interaksi dengan wisatawan mancanegara (Mustawazir et al., 2020). Di Sabang, dinamika serupa juga dilaporkan dalam penelitian tentang komunikasi masyarakat lokal dengan wisatawan mancanegara yang menyoroti penggunaan bahasa tubuh/gestur ketika terjadi keterbatasan bahasa (Septian & Amri, 2018).

Secara konseptual, kecenderungan komunikasi yang tidak langsung dapat dipahami sebagai strategi menjaga keharmonisan sosial, tetapi dalam komunikasi lintas budaya ia berpotensi dibaca berbeda oleh pihak yang terbiasa dengan komunikasi lebih eksplisit. Karena itu, pola komunikasi masyarakat Aceh dalam interaksi dengan warga negara asing tampak sebagai praktik yang menegosiasikan dua kebutuhan sekaligus: keterbukaan untuk berinteraksi dengan pihak luar dan komitmen mempertahankan norma kesantunan setempat. Negosiasi tersebut terlihat dari kombinasi pilihan tutur yang halus, kontrol isyarat nonverbal, serta penggunaan strategi penjelasan sederhana ketika diperlukan, sehingga makna tetap dapat dipertukarkan tanpa mengorbankan etika sosial yang dijunjung. Penekanan pada kehati-hatian dan pengelolaan perilaku dalam komunikasi lintas budaya—termasuk potensi hambatan akibat perbedaan budaya—juga terlihat pada studi interaksi wisatawan asing dan masyarakat lokal di Sabang (Anshar & Yahya, 2017).

2. Faktor Sosial dan Budaya yang Membentuk Pola Komunikasi

Dalam kajian komunikasi antarbudaya, pola komunikasi tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh kerangka nilai dan struktur sosial yang mengatur bagaimana individu “seharusnya” bertutur, bersikap, dan mengelola relasi sosial. Pada masyarakat yang norma kolektifnya kuat, praktik komunikasi umumnya menekankan keselarasan

relasi, penghormatan terhadap tatanan sosial, serta pengendalian ekspresi agar tidak memicu ketegangan. Dalam konteks Aceh, nilai keagamaan dan adat istiadat berperan sebagai rujukan normatif yang memberi batas terhadap bentuk-bentuk keterbukaan, terutama dalam situasi perjumpaan dengan pihak luar. Literatur tentang Aceh juga menegaskan keterjalinan adat dan Islam dalam kehidupan sosial (“adat... bernafaskan Islam” dan menjadi pedoman hidup), sehingga norma agama/adat cenderung hadir sebagai kerangka etis dalam praktik sosial sehari-hari. (Sikumbang et al., 2018; Muthia, 2021).

Berdasarkan catatan observasi, nilai-nilai keagamaan tampak hadir sebagai latar yang memengaruhi cara masyarakat mengelola interaksi dengan warga negara asing, terutama terkait kesantunan, kehati-hatian dalam bertutur, dan pengaturan batas sosial. Kecenderungan untuk menjaga tutur kata, menghindari gaya bicara yang terlalu lugas, serta mempertahankan intonasi yang tenang muncul sebagai praktik yang berulang dalam interaksi di ruang publik. Pada situasi lintas gender, pengendalian sikap nonverbal—seperti menjaga jarak fisik dan membatasi kontak mata—tampak lebih menonjol, yang dapat dipahami sebagai ekspresi dari norma kesopanan dan kehormatan yang hidup dalam ruang sosial Aceh. Kecenderungan ini sejalan dengan penjelasan dalam kajian-kajian berbasis Aceh yang menunjukkan bahwa regulasi sosial-keagamaan turut membentuk batas kepantasan perilaku (termasuk pada relasi sosial dan peran gender) dalam kehidupan publik. (Sikumbang et al., 2018; Muthia, 2021). Dengan demikian, kehati-hatian dalam komunikasi tidak sekadar persoalan keterampilan individu, melainkan terkait dengan cara norma sosial “bekerja” dalam mengatur kelayakan interaksi.

Selain nilai agama, adat istiadat Aceh juga tampak membentuk preferensi terhadap strategi komunikasi yang tidak konfrontatif. Dalam beberapa situasi layanan dan percakapan singkat, kecenderungan untuk menggunakan ungkapan yang halus, menghindari penolakan langsung, dan memilih cara penyampaian yang lebih aman menunjukkan pentingnya menjaga muka (face) dan keharmonisan. Pada titik ini, praktik komunikasi masyarakat Aceh memperlihatkan keterkaitan dengan orientasi sosial yang menempatkan penghormatan dan kehormatan sebagai acuan interaksi. Penekanan pada keharmonisan relasi dan penghindaran gesekan juga terlihat dalam studi komunikasi lintas budaya di Aceh pada konteks lain (misalnya interaksi antarkelompok etnis), yang menempatkan adaptasi dan saling pengertian sebagai prasyarat komunikasi efektif.

(Anismar & Anita, 2018). Kerangka adat tersebut bekerja sebagai “filter” yang menuntun penutur memilih bentuk ujaran dan isyarat yang dianggap pantas, khususnya ketika berhadapan dengan pihak yang belum sepenuhnya dipahami latar budayanya.

Faktor pengalaman sosial juga terlihat memengaruhi fleksibilitas komunikasi. Di lokasi-lokasi dengan intensitas perjumpaan lintas budaya yang tinggi, penyesuaian gaya komunikasi tampak lebih mudah ditemukan, misalnya melalui penggunaan bahasa Indonesia yang lebih sederhana, pengulangan informasi, dan pemanfaatan gestur untuk memperjelas maksud. Sebaliknya, pada situasi di mana interaksi lintas budaya tampak lebih jarang, kehati-hatian cenderung muncul lebih kuat dan komunikasi menjadi lebih terbatas pada bentuk-bentuk yang dianggap aman. Dalam kajian interaksi lintas budaya di Aceh, penggunaan bahasa Indonesia sebagai “jembatan” komunikasi juga dilaporkan sebagai bagian dari proses adaptasi ketika terjadi perbedaan bahasa, sehingga pengalaman perjumpaan turut berperan sebagai pembelajaran sosial dalam membangun kelancaran komunikasi. (Safrizal, 2018; Anismar & Anita, 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa keterpaparan terhadap perjumpaan lintas budaya berperan sebagai pengalaman belajar sosial yang memperkaya strategi komunikasi, tanpa harus menggeser norma dasar yang menjadi rujukan masyarakat.

Dengan demikian, faktor sosial dan budaya yang tampak melalui observasi yang meliputi nilai keagamaan, adat, pengalaman perjumpaan lintas budaya, serta pengelolaan relasi lintas gender, membentuk kerangka yang menuntun pilihan bahasa, gaya bertutur, dan penggunaan isyarat nonverbal. Alih-alih bekerja sebagai faktor tunggal, unsur-unsur tersebut saling berkelindan dalam praktik komunikasi sehari-hari. Dalam kerangka komunikasi antarbudaya, kondisi ini menegaskan bahwa pola komunikasi masyarakat Aceh dapat dipahami sebagai produk negosiasi antara tuntutan keterbukaan pada interaksi lintas budaya dan kebutuhan mempertahankan tatanan nilai yang memberi rasa aman serta keteraturan dalam relasi sosial.

3. Adaptasi Komunikasi Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Perbedaan Budaya

Dalam komunikasi antarbudaya, adaptasi merupakan proses penyesuaian strategi komunikasi agar makna dapat dipertukarkan secara efektif di tengah perbedaan bahasa, kebiasaan sosial, dan ekspektasi interaksi. Adaptasi tidak selalu berarti mengubah identitas budaya, melainkan sering hadir sebagai strategi pragmatis untuk menjaga kelancaran komunikasi sekaligus mempertahankan norma yang dianggap pantas. Dalam

masyarakat dengan norma kesantunan yang kuat, adaptasi biasanya berlangsung melalui pengaturan pilihan bahasa, gaya tutur, serta pengelolaan isyarat nonverbal agar interaksi tetap nyaman bagi kedua pihak. Namun, literatur komunikasi lintas budaya di Indonesia juga menunjukkan bahwa perjumpaan lintas budaya dapat memunculkan ketegangan—misalnya gegar budaya (*culture shock*), perbedaan kebiasaan sehari-hari, dan salah tafsir—yang kemudian mendorong kebutuhan adaptasi lebih lanjut. (Rudianto et al., 2015; Simatupang et al., 2015).

Berdasarkan catatan observasi, salah satu bentuk adaptasi yang paling tampak adalah penyesuaian bahasa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang lebih sederhana dan, pada situasi tertentu, penyisipan ungkapan bahasa asing yang bersifat dasar. Ketika hambatan bahasa muncul, kelancaran komunikasi kerap dijaga melalui pengulangan informasi, penjelasan yang diperlambat, serta penguatan pesan dengan gestur dan ekspresi wajah. Strategi ini menunjukkan bahwa adaptasi tidak hanya bertumpu pada kemampuan linguistik, tetapi juga pada pemanfaatan konteks situasional untuk membangun pemahaman bersama. Pada beberapa interaksi, isyarat nonverbal (mengangguk, menunjuk arah, atau ekspresi ramah) berfungsi sebagai penopang makna, terutama ketika pertukaran kata tidak sepenuhnya memadai. Temuan ini sejalan dengan kajian komunikasi lintas budaya di kawasan wisata Indonesia yang menempatkan perbedaan bahasa sebagai kendala utama, sehingga komunikasi nonverbal dan pembelajaran bahasa lokal sering menjadi jalan praktis untuk mengurangi hambatan. (Rudianto et al., 2015).

Adaptasi juga terlihat pada penyesuaian gaya bertutur. Dalam situasi tertentu, masyarakat Aceh tampak berupaya membuat pesan lebih mudah dipahami oleh warga negara asing dengan menyampaikan informasi secara lebih jelas, namun tetap menjaga intonasi dan pilihan kata yang halus. Penyesuaian ini berjalan dalam batas norma kesopanan setempat, misalnya dengan tetap menghindari konfrontasi langsung dan menjaga ekspresi emosional agar tidak terkesan menekan. Dengan kata lain, adaptasi dilakukan dengan “mengalihkan bentuk” penyampaian pesan—dari yang sangat implisit menjadi lebih jelas—tanpa mengubah orientasi nilai dasarnya, yaitu menjaga keharmonisan relasi. Literatur tentang gaya komunikasi dan adaptasi budaya di Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan gaya tutur (misalnya lugas vs tidak langsung) dapat memicu kebingungan, resistensi, atau penilaian negatif, sehingga individu sering

menyesuaikan cara berbicara untuk mengurangi ketegangan dalam interaksi. (Simatupang et al., 2015).

Selain aspek bahasa dan gaya tutur, adaptasi tampak dalam pengelolaan topik pembicaraan. Dalam interaksi dengan warga negara asing, topik yang berpotensi sensitif—seperti isu agama, politik, atau norma sosial tertentu—cenderung dihindari pada fase awal komunikasi, sementara topik yang lebih netral seperti budaya, kuliner, dan pariwisata lebih sering digunakan sebagai pembuka percakapan. Strategi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membangun rasa aman dan mengurangi peluang kesalahpahaman akibat perbedaan nilai. Pemilihan topik yang “aman” juga menunjukkan bahwa adaptasi tidak hanya berorientasi pada efektivitas pesan, tetapi sekaligus pada pengelolaan relasi dan batas sosial dalam interaksi lintas budaya. Dalam konteks Aceh yang memiliki norma sosial-keagamaan kuat, pengelolaan batas topik dapat dibaca sebagai bentuk mitigasi risiko sosial—yakni mencegah timbulnya gesekan akibat perbedaan norma dan ekspektasi perilaku. (Sikumbang et al., 2018).

Secara konseptual, adaptasi komunikasi masyarakat Aceh dalam perjumpaan lintas budaya dapat dipahami sebagai praktik negosiasi yang berlangsung terus-menerus, terutama ketika bertemu dengan gaya komunikasi warga negara asing yang cenderung lebih langsung. Adaptasi tampak sebagai kombinasi strategi: penyederhanaan bahasa, penguatan nonverbal, penyesuaian kejelasan tutur, dan seleksi topik pembicaraan. Kombinasi tersebut memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pihak luar dan pemeliharaan norma lokal, sehingga komunikasi dapat berlangsung tanpa mengaburkan identitas serta etika sosial yang menjadi rujukan masyarakat. Pada saat yang sama, negosiasi ini juga menandakan adanya potensi ketegangan yang dikelola: ketika perbedaan gaya komunikasi atau kebiasaan memicu salah tafsir, adaptasi menjadi perangkat sosial untuk meredam ketidaknyamanan dan mempertahankan keberlanjutan interaksi. (Rudianto et al., 2015).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi masyarakat Aceh dalam interaksi dengan warga negara asing cenderung menekankan kesantunan, kehati-hatian, dan kecenderungan komunikasi tidak langsung, baik pada aspek verbal maupun nonverbal. Dalam praktik yang teramati, bahasa Indonesia menjadi medium utama yang sering dipadukan dengan strategi pragmatis seperti penyederhanaan tuturan, pengulangan

informasi, serta dukungan isyarat nonverbal (gestur, ekspresi, jarak fisik, dan kontak mata) untuk menjaga kelancaran pertukaran makna. Pola tersebut dapat dipahami dalam kerangka budaya berkonteks tinggi, di mana makna komunikasi banyak ditopang oleh konteks situasional dan norma kesopanan yang berlaku.

Faktor sosial-budaya yang menyertai praktik komunikasi tersebut mencakup nilai keagamaan, adat istiadat, pengalaman perjumpaan lintas budaya, serta pengelolaan relasi lintas gender dalam ruang sosial. Adaptasi komunikasi tampak sebagai upaya menyeimbangkan keterbukaan terhadap pihak luar dengan pemeliharaan norma lokal, melalui penyesuaian bahasa, gaya bertutur, penguatan komunikasi nonverbal, serta pemilihan topik yang dianggap aman. Dengan demikian, komunikasi antarbudaya di Aceh dapat dipahami sebagai proses negosiasi yang dinamis, di mana efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada bahasa, tetapi juga pada sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Al-Kasyaf, M. Z., & Nasaruddin, R. B. (2025). Applying Muslim-friendly tourism principles in destination management: Evidence from Aceh, Indonesia. *International Journal of Halal Industry*, 1(1), 68–83. <https://doi.org/10.20885/IJHI.vol1.iss1.art5>
- Ambele, E. A., & Boonsuk, Y. (2018). Silence of Thai students as a face-saving politeness strategy in a multicultural university context. *Arab World English Journal*, 9(4), 221–231. <https://doi.org/10.24093/awej/vol9no4.16>
- Anshar, T., & Yahya, M. (2017). Analisis sikap dan perilaku antara wisatawan asing dengan masyarakat lokal Kota Sabang dalam dinamika komunikasi antarbudaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–11. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/3804>
- Fadhlina, C. I., Mustawazir, M., & Saleh, R. (2020). Analisis bahasa dan perilaku komunikasi antarbudaya antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1–12. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5414>
- Giles, H., Edwards, A. L., & Walther, J. B. (2023). Communication accommodation theory: Past accomplishments, current trends, and future prospects. *Language Sciences*, 99, 101571. <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2023.101571>
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.

- Lestari, D., & Sutrisno. (2020). Pola komunikasi lintas budaya pada pasangan warga negara Indonesia dan warga negara asing. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 12–25. <https://journal.unsika.ac.id/JPRMEDCOM/article/view/4285>
- McNevin, A., & Missbach, A. (2018). Hospitality as a horizon of aspiration (or, What the international refugee regime can learn from Acehnese fishermen). *Journal of Refugee Studies*, 31(3), 292–313. <https://doi.org/10.1093/jrs/fey014>
- Mustawazir, M., Anisah, N., & Saleh, R. (2020). Analisis bahasa dan perilaku komunikasi antarbudaya antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1–12. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5414>
- Rudianto, Syam, T., & Harahap, M. S. (2015). Komunikasi lintas budaya wisatawan asing dan penduduk lokal di Bukit Lawang. *Jurnal Simbolika*, 1(2), 188–192.
- Safrizal. (2018). Komunikasi antarbudaya pengungsi etnis Rohingya dengan masyarakat Aceh di Camp Bayeun Aceh Timur. *Al-Hikmah: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*, 9(1), 94–116. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1729>
- Septian, O., & Amri, A. (2020). Dinamika komunikasi antarbudaya masyarakat Kota Sabang dengan wisatawan mancanegara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 1–10. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/8443>
- Sikumbang, A. T., Sahrul, & Fitriani. (2018). Komunikasi antar budaya dalam proses pernikahan (Studi komparasi adat Aceh Utara dan adat Aceh Besar). *At-Balagh*, 2(1), 1–18.
- Simatupang, O., Lubis, L. A., & Wijaya, H. (2015). Gaya berkomunikasi dan adaptasi budaya mahasiswa Batak di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(5), 314–329.
- Sitimaghfirah, F. (2022). Adaptasi pendatang luar Aceh terhadap bahasa dalam komunikasi antarbudaya. *Sadida: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 2(2), 45–57. <https://journal.ar-raniry.ac.id/sadida/article/view/2281>
- Suryadinata, L. (2003). *Interaksi antarbudaya di Asia Tenggara*. LP3ES.
- Zurrahmah, Z., Ramli, R., & Armia, A. (2020). Kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial masyarakat di Pasar Keumireu Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 1–10. <https://jim.usk.ac.id/pbsi/article/view/6981>